

## RINGKASAN

Penelitian ini mengambil judul Politik Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun di Dusun Winong Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menjelaskan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pasal 175 dan 176 yang ada di Dusun Winong Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. 2) Menjelaskan relasi aktor dan aktor dominan yang ada di dalam Implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. Melalui paradigma konstruktivisme dan perspektif institusionalisme, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yang berlokasi di Dusun Winong Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya konflik di antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta karena masyarakat kurang menerima dengan keputusan pemerintah juga swasta terkait pengelolaan limbah yang ada di Dusun Winong. Dan implementasi di dominasi oleh pihak pemerintah. Terdapat adanya relasi antar aktor lembaga pemerintah dan juga swasta yang terbentuk karena kepentingan politik di dalamnya. Aktor tersebut adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang bekerja sama dengan PLTU Karangandri. Dimana relasi yang terbentuk dengan menggunakan tipe *decisional*.

Permasalahan dalam Politik Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pasal 175 dan 176 merupakan permasalahan yang terjadi melalui adanya ketidaksesuaian kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah beserta PLTU di Dusun Winong mengenai dalam hal pengelolaan limbah. Adanya penggunaan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor menjadi satu kekuatan dalam permainan politik. Di dalam kebijakan dapat digunakan untuk menentukan pilihan-pilihan terakhir keputusan. Dengan adanya permasalahan tersebut, memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap beserta dengan Pemerintah Desa belum bisa bekerja dengan maksimal dengan adanya keterlibatan PLTU di dalamnya. Sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam persoalan kebijakan pengelolaan limbahnya yang ada di dusun mereka, yaitu Dusun Winong Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

**Kata Kunci : Peraturan Pemerintah, Konflik Masyarakat, Relasi Aktor.**

## SUMMARY

*This study takes the title Politics of Implementation of Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste in Winong Hamlet, Slarang Village, Kesugihan District, Cilacap Regency. This study aims to: 1) explain the implementation of Government Regulation Number 101 of 2014 articles 175 and 176 in Winong Hamlet, Slarang Village, Kesugihan District, Cilacap Regency. 2) Describe the relationship between dominant actors and actors in the implementation of these government regulations. Through the constructivism paradigm and institutionalism perspective, this study uses a qualitative research method with a case study approach. Which is located in Winong Hamlet, Slarang Village, Kesugihan District, Cilacap Regency.*

*The results showed that there was a conflict between the community and the government and the private sector because people did not accept government and private decisions regarding waste management in Winong Hamlet. And implementation is dominated by the government. There is a relationship between government agency and private actors that are formed because of political interests in them. These actors are the District Government and Village Government in collaboration with PLTU Karangandri. Where is the relation formed using the decisional type.*

*Problems in the Political Implementation of Government Regulation Number 101 of 2014 articles 175 and 176 are problems that occur through the mismatch of policies carried out by the government and the PLTU in Winong Hamlet regarding waste management. The use of power possessed by each actor becomes a force in political games. In the policy can be used to determine the final choices of decisions. With this problem, it shows that the Cilacap Regency Government and the Village Government have not been able to work optimally with the involvement of the PLTU in it. So that the community is less involved in the issue of waste management policies in their hamlet, namely Winong Hamlet, Slarang Village, Kesugihan District, Cilacap Regency.*

**Keywords: Government Regulation, Community Conflict, Actor Relations.**